

PENGARUH ALIANSI TRILATERAL AUKUS TERHADAP KEAMANAN KAWASAN REGIONAL ASIA PASIFIK

Bayu Hanuranto Wicaksono¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRAK

Saat ini terdapat aliansi militer antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, yang sering disingkat AUKUS. Aliansi ini akan memungkinkan pembagian kemampuan pertahanan yang lebih besar dan dapat membantu Australia dalam memperoleh kapal selam nuklir. Saat ini, hanya enam negara di dunia yang mengoperasikan kapal selam nuklir. Ini termasuk Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Prancis, India, dan Rusia. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik bereaksi berbeda terhadap kehadiran AUKUS, namun secara umum memiliki kesamaan dalam hal kekhawatiran. Kajian ini akan mengeksplorasi lebih jauh reaksi dan dampak AUKUS terhadap negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang sudah menganggap AUKUS sebagai potensi ancaman bagi negaranya. Tentu saja dampaknya berdampak pada permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan terutama aspek pertahanan dan keamanan masing-masing negara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif.

Kata Kunci: Aliansi, AUKUS, Pertahanan, Asia Pasifik.

ABSTRACT

At this time there is a military alliance made by Australia, England and America or often shortened to AUKUS. The alliance allows for greater sharing of defense capabilities, including helping Australia to acquire nuclear-powered submarines. Currently, only six countries in the world operate nuclear-powered submarines. They include America, England, China, France, India and Russia. With the presence of AUKUS, countries in the Pasific Asia region have given varying responses, but almost the same, namely concern. This research will further explore the response and influence of AUKUS on Pasific Asian countries which already consider that it could be a threat to them. The influence of course is on economic, social, political issues and most importantly on the defense and security side of each country. This research was conducted using qualitative research methods with descriptive analysis research type.

Keywords: Alliance, AUKUS, Defense, Asia Pasific.

PENDAHULUAN

Pada abad 21 ini, Isu Hubungan Internasional semakin kompleks, salah satunya adalah isu dalam sektor keamanan yang berkaitan dengan wilayah atau regional indo pasifik. Tahun 2021, tiga negara maju yakni Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat mengumumkan terkait perjanjian keamanan internasional yang dirangkum dalam Pakta AUKUS. Nama AUKUS sendiri diambil dari akronim tiga negara yang menginisiasi pakta tersebut, yaitu Australia, United Kingdom (Britania Raya), dan United

States (Amerika Serikat). Pakta tersebut meliputi kerja sama teknologi kecerdasan buatan, siber, kuantum, sistem bawah air, dan kemampuan serangan jarak jauh yang akan berlangsung 18 bulan ke depan. Tujuan dibuatnya kesepakatan ini untuk mengimbangi dominasi kekuatan militer Tiongkok yang dinilai semakin meluas dan berpotensi membahayakan wilayah Asia-Pasifik. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut “ancaman China,” kesepakatan trilateral tersebut diklaim banyak kalangan ditujukan untuk mengurangi pengaruh China di kawasan Asia-Pasifik.

Sekilas memang tidak terlihat adanya kejanggalan dalam kesepakatan tersebut. Namun bila kita perhatikan lebih jeli isi kesepakatan tersebut, terlihat bahwa adanya potensi Australia untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi dari Britania Raya dan Amerika Serikat. Proyek kapal selam ini bertujuan untuk melanjutkan pembangunan kapal selam kelas *Collins* dari *Project Sea 1000*. Proyek yang sebelumnya tertunda karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nuklir, kini kembali berjalan setelah dibantu oleh Amerika Serikat sebagai pemasok bahan bakar nuklir dengan bantuan desain yang dibuat oleh Britania Raya.

Walaupun begitu, Menurut kesepakatan Internasional, hanya negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa saja yang diberi izin untuk mengembangkan serta melakukan pengayaan uranium untuk senjata nuklir, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, dan Rusia. Tetapi Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, dengan tegas menepis tuduhan bahwa mereka akan melakukan pengayaan uranium sendiri melainkan mengambil dari Amerika Serikat yang akan memasok uranium yang telah melalui proses pengayaan. Pakta AUKUS ini pun memicu beragam respon dari berbagai pihak baik perwakilan masing-masing negara hingga pengamat hubungan internasional. Kegaduhan pun mulai terjadi di kawasan Asia-Pasifik karena dikhawatirkan wilayah tersebut akan mengalami security dilemma dari segi kekuatan militer. Tiongkok pun tidak tinggal diam dan mengkritisi pemberlakuan.

Kemitraan militer yang baru diumumkan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia – yang disebut pakta AUKUS – akan memiliki implikasi yang tidak jelas tetapi kemungkinan luas untuk keseimbangan strategis masa depan di Asia. Mungkin bagian terpenting dari kemitraan tripartit adalah bahwa Australia akan dipersenjatai dengan armada baru kapal selam bertenaga nuklir (SSN), yang memiliki jangkauan dan daya tahan

yang jauh lebih besar daripada armada kapal selam diesel buatan Prancis yang sangat mahal telah diganti.

Sementara China tidak secara eksplisit disebutkan dalam pengumuman AUKUS, itu jelas menandakan penguatan posisi AS terhadap China, dan peningkatan signifikan dari pertarungan strategis. Sam Roggeveen dari Lowy Institute mencatat dalam sebuah artikel kemarin bahwa sementara sebelumnya ada alasan untuk mempertanyakan apakah Washington benar-benar menginginkan “Perang Dingin” baru dengan China, “pengumuman ini adalah bukti signifikan bahwa pihaknya memang siap untuk mengambil langkah penting seperti itu.

Dari sudut pandang Australia, kesepakatan ini merupakan pertarungan komitmen jangka panjang Washington untuk mempertahankan dominasi militernya di Asia. Rory Medcalfe dari Australian National University membandingkannya dengan melintasi "Rubicon strategis". Banyak pengamat, termasuk mantan Perdana Menteri Paul Keating dan pakar realis Hugh White, percaya bahwa alih-alih melengkapi Australia dengan SSN, Amerika Serikat mengharapkan Australia untuk terlibat secara besar-besaran dalam upaya di masa depan untuk membendung konflik dengan Tiongkok.

Dibandingkan dengan Asia Tenggara, reaksi China terhadap AUKUS sudah bisa ditebak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri kemarin mengecam pengelompokan itu sebagai cerminan dari "mentalitas perang dingin yang ketinggalan zaman dan persepsi geopolitik yang berpikiran sempit" yang "mengintensifkan" perlombaan senjata regional. Selain mengecam kemitraan tersebut, Beijing kemungkinan akan memainkan keuntungan utamanya atas AS: ekonomi. Kebetulan hari ini, sehari setelah AUKUS diumumkan, China mengajukan permohonan untuk bergabung dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). CPTPP, yang ditandatangani oleh 11 negara termasuk Australia, Kanada, Chili, Jepang, dan Selandia Baru pada tahun 2018, adalah perjanjian penerus Kemitraan Trans-Pasifik yang dinegosiasikan dengan susah payah oleh pemerintahan Obama sebelum Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan tak lama setelah menjabat pada tahun 2017 (El-Haq, 2017).

Langkah tersebut menandakan substansi kepentingan strategis Beijing di Asia Tenggara dan Asia-Pasifik: untuk memperdalam integrasi ekonominya dengan kawasan sedemikian rupa sehingga negara-negara ditarik oleh gravitasi ekonomi semata-mata ke

orbitnya. Sementara akses China ke CPTPP menghadapi sejumlah hambatan, ini menyoroiti fakta bahwa AS saat ini berada di luar dua pakta perdagangan utama Asia-Pasifik (Irawan, 2012).

Selain dari itu yang juga tidak kalah pentingnya adalah pengakuan dari Asutralia yang menyatakan bahwa mereka masih tetap komitmen terhadap perjanjian dan persaudaraan dengan ASEAN. Menurut pengakuan dari Asutralia yang menyatakan bahwa AUKUS "bukan aliansi atau pakta pertahanan" yang dibentuk negara itu bersama AS dan Inggris. Duta Besar Australia untuk ASEAN Will Nankervis mengatakan perjanjian itu tidak mengubah komitmen Australia terhadap ASEAN maupun dukungan berkelanjutan untuk arsitektur regional yang dipimpin ASEAN.

Berbeda dengan pernyataan Australia, justru pemerintah Indonesia sangat menyayangkan adanya AUKUS dengan program kapal selamnya. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri termasuk yang menyatakan prihatin dengan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia. Indonesia mengingatkan kembali komitmen Australia terhadap non-proliferasi nuklir dan juga keamanan serta stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Meski pejabat ketiga negara AUKUS berkali-kali menekankan aliansi ini tidak ditujukan kepada negara tertentu, sebagian besar analisis mengatakan, China-lah yang memicu pembentukan AUKUS.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif pada dasarnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian tanpa melibatkan angka. Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif yang didasarkan dari perhitungan atau kuantitas. Meskipun begitu, metode penelitian kualitatif tetap dianggap ilmiah dan relevan karena metode ini menekankan pada kealamiah sumber data. Penelitian alamiah akan dibutuhkan dan dimanfaatkan terutama pada saat penjelasan definisi atau paradigma alamiah. Pada dasarnya metode penelitian kualitatif adalah cara atau upaya dalam menjelaskan sebuah fenomena sosial, sebuah perspektif, sebuah tindakan, dan sebagainya dengan menggunakan kata-kata. Kata-kata tersebut dirangkai menjadi kalimat-kalimat ke dalam konteks isu yang sedang diteliti secara alamiah dan dapat memanfaatkan berbagai metode alamiah. Secara khas, metode

penelitian kualitatif tidak memasukkan sumber data dalam bentuk angka namun sumber data yang ilmiah dalam bentuk kata dan bisa dideskripsikan dalam penelitian tersebut.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penulis ingin menjelaskan secara deskriptif permasalahan yang diteliti. Penulis ingin meneliti secara mendalam bagaimana Amerika Serikat membuat strategi keamanan cybernya dalam Perang Dagang dengan China. Factor-faktor apa saja yang melatarbelakangi strategi keamanan cyber tersebut sehingga terciptalah kebijakan-kebijakan yang mana hal tersebut pasti berkaitan dengan kepentingan nasionalnya.

KERANGKA ANALITIK

Neorealisme

Neorealisme adalah salah satu perspektif utama dalam kajian teori- teori Hubungan Internasional kontemporer. Bab ini membahas tentang asumsi dasar neorealisme tentang anarki dan struktur sistem internasional yang dalam perkembangan perspektif neorealisme menjadi titik tolak penjelasan tentang perilaku negara, struktur politik internasional, agenda- agenda utama dalam hubungan internasional, serta bagaimana kaum neorealis memberikan penjelasan teoritik tentang cara agar stabilitas dan perdamaian internasional dapat dicapai. Pemahaman tentang hal-hal ini diharapkan dapat membantu pembaca menjelaskan berbagai fenomena interaksi hubungan internasional dengan menggunakan kacamata perspektif neorealis.

Teori neorealisme berawal dari kajian Kenneth Waltz tentang *structural realism* dalam bukunya *Theory of International Politics* (1979). Waltz lebih menekankan pentingnya melihat bagaimana kondisi struktur internasional yang dapat memengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan luar negeri. Menurut Waltz, stuktur dipahami sebagai prinsip tatanan sistem internasional, yang mana merupakan anarki dan distribusi kapabilitas antar unit yang mana merupakan negara-negara. Dengan kata lain, struktur sistem internasional yang membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Neorealisme muncul sebagai kritik atas asumsi dasar realisme yang menganggap sifat dasar manusia (human nature) sebagai penjelasan atas berbagai perebutan kekuasaan dalam hubungan internasional (Mearsheimer, 2013: 78). Dalam pandangan neorealisme, sifat dasar manusia yang konfliktual tidak berdampak pada perilaku negara dalam politik

internasional. Menurut pandangan neorealisme, yang lebih berpengaruh adalah struktur anarki internasional. Struktur ini memaksa negara untuk bertindak agresif. Buku Kenneth N. Waltz tentang Structural Realism Realisme tradisional menjelaskan konfliktualisme negara-negara karena sistem internasional sudah *state of nature*. **Supremasi Struktur Anarkis**

Sejak Morgenthau (1950) mengutarakan idenya mengenai politik internasional, perdebatan dalam melihat politik internasional selalu terpusat untuk menganalisis negara sebagai aktor utama. Realisme klasik, yang menjadi perspektif utama pada saat itu, menganggap bahwa sumber perilaku negara (termasuk konsekuensi konfliktualnya) adalah egoisme pemimpin politik negara. Konflik tidak dapat dihindari dalam politik internasional karena pada dasarnya semua manusia mempunyai sifat jahat yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

Analisis realisme klasik yang berfokus pada sifat dasar manusia sebagai pendorong perilaku negara ini menimbulkan permasalahan. Argumen bahwa permasalahan yang muncul dan kondisi politik internasional sekarang adalah hasil dari beberapa titik lemah negara (yang bila ditarik penjelasannya akan berakhir pada sifat alamiah manusia) memunculkan kesulitan bagi penstudi HI untuk menganalisis perilaku negara. Bagaimana bila ada negara yang memiliki aspek kultural berbeda? Benarkah setiap manusia memiliki hasrat yang sama untuk memperoleh kekuasaan? Kalau begitu kondisinya, bukankah seharusnya setiap manusia (dan negara) akan saling menyerang satu sama lain demi memperebutkan kekuasaan? Bagaimana lantas menjelaskan adanya kondisi ketiadaan perang (terutama sesudah berakhirnya Perang Dunia II) di level internasional. Untuk itulah, neorealisme mencoba berangkat dari tradisi yang berbeda dengan realisme klasik. Bila realisme klasik lebih banyak membahas mengenai perilaku manusia dan agen (negara) yang mempengaruhi struktur internasional, neorealisme justru berfokus pada struktur internasional yang mempengaruhi perilaku aktor (negara). Dengan begitu, neorealisme terpengaruh juga oleh tradisi behavioralisme yang menginginkan ada teori dasar tentang perilaku negara yang bisa menjelaskan perilaku umum negara dalam semua kondisi.

Konsep Kepentingan Nasional

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa konsep yaitu, Konsep Kepentingan Nasional (National Interest), Aliansi, Pertahanan dan Pertahanan Militer. Untuk membahas Kepentingan AS di dalam kawasan Asia Pasifik melalui aliansi pertahanan AUKUS pada tahun 2021, analisis tesis ini dikembangkan dengan melihat kepentingan dari Negara AS sendiri.

Dalam menjalankan hubungan internasional, suatu negara harus memiliki kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam menjalankan interaksi hubungan internasional. Apakah yang dimaksud dengan kepentingan nasional tersebut? Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan dan cita cita yang ingin di capai oleh suatu negara dalam melakukan interaksi hubungan internasional. Kepentingan nasional merupakan sebuah kepentingan yang bersifat elastis. Selain itu, teori tentang kepentingan nasional ini bersifat abstrak dan tidak bisa diketahui dengan pasti.

Kepentingan nasional tidak akan bisa di jalankan atau di capai apabila suatu aktor negara tidak memiliki kebijakan dan kekuatan. Kebijakan merupakan cara, metode atau alat untuk melakukan dan mencapai kepentingan nasional. Sedangkan kekuatan merupakan modal untuk mencapai dan mewujudkan kepentingan nasional negara itu sendiri. Kepentingan nasional merupakan tujuan negara untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan ke negara lain.

Konsep Aliansi

Aliansi ialah dalah penggabungan antara dua atau lebih kelompok menjadi satu dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan masing-masing dengan lebih baik karena adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Aliansi dapat juga diartikan sebagai persekutuan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau organisasi, yang mempunyai sumberdaya (sarana, prasarana, dana, keahlian, akses, pengaruh, informasi) dan bersedia untuk terlibat aktif atau berperan dalam menjalankan fungsi dan tugas tertentu. Pengertian aliansi dalam hubungan internasional adalah kerjasama antara organisasi atau kelompok tertentu dalam ruang lingkup internasional (antar negara), baik dalam bidang politik ataupun bisnis dalam rentang waktu tertentu. Pada umumnya

pihak-pihak yang melakukan aliansi akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan sebelum melakukan aliansi.

Konsep Power

Power dalam konteks internasional dan geopolitik merujuk pada kemampuan atau daya yang dimiliki oleh suatu negara atau organisasi untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan lainnya. Power dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kekuatan militer, ekonomi, diplomatik, dan teknologi. Dalam konteks analisis geopolitik, power seringkali digunakan untuk memahami dinamika hubungan antarnegara dan pengaruhnya terhadap stabilitas dan keamanan regional.

Joshua S. Goldstein di dalam bukunya yang berjudul “*International Relations*” mendefinisikan power sebagai, “*the ability to influence the behavior of others. Military force and economic sanctions are among the various means states use to try to influence each other*”. Joshua S. Goldstein mendefinisikan *power* sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku lain (aktor). Kekuatan militer dan sanksi ekonomi merupakan pilihan yang digunakan negara untuk mencoba mempengaruhi aktor lain.

Daniel S. Papp di dalam bukunya yang berjudul “*Contemporary International Relations: Framework for Understanding*” mendefinisikan power sebagai, “*the ability of any actor to persuade, influence, force, or otherwise induce another actor to undertake an action or change an objective that the latter would otherwise prefer not to do.*” Daniel S. Papp mendefinisikan *power* sebagai kemampuan dari aktor untuk melakukan persuasi, pengaruh, paksaan, atau mendorong aktor lain untuk melakukan suatu tindakan atau mengubah suatu tujuan yang seharusnya tidak dilakukan (oleh aktor tersebut).

PEMBAHASAN

Dinamika Geopolitik di Kawasan Asia Pasifik

Secara geografis wilayah Asia-Pasifik merujuk pada kawasan yang membentang dari bagian timur Samudera Hindia ke Samudra Pasifik bagian barat dan terhubung dengan Selat Malaka. Asia-Pasifik telah menjadi pusat kegiatan geopolitik maritim, keamanan, perdagangan, dan lingkungan. Wilayah Asia-Pasifik terkenal akan ramainya aktivitas perdagangan dan kegiatan perekonomian lainnya. Contohnya adalah peranan

Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran sekaligus perdagangan yang menghubungkan India, China, serta negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), organisasi yang bernaung di Asia Tenggara lebih menempatkan dirinya untuk berfokus dalam mensejahterakan serta menciptakan kestabilan ekonomi untuk setiap negara di Asia Tenggara.

Namun, fokus ASEAN tersebut berubah secara drastis setelah Pakta AUKUS tercipta. Pakta AUKUS yang diciptakan dengan tujuan untuk meredam kekuatan militer China di wilayah Asia-Pasifik, justru menjadi bumerang tersendiri untuk negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara kini sedang mengalami *security dilemma* karena diapit oleh dua kekuatan militer yang masif dari Tiongkok dan Aliansi AUKUS. Selain itu, salah satu kebijakan Pakta AUKUS yang memungkinkan Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dianggap dapat membahayakan. Banyak negara di Asia Tenggara berpendapat kehadiran kapal selam bertenaga nuklir di Australia melanggar *Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT). NPT adalah perjanjian internasional yang mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata untuk menekan penggunaan energi nuklir demi tujuan damai serta mencapai perlucutan senjata nuklir.

Kondisi di Laut Natuna Utara sendiri, mengalami peningkatan tegangan. Menurut Angkatan Laut Indonesia, mereka mendeteksi kapal-kapal milik Tiongkok dan Amerika Serikat lebih banyak dibanding sebelumnya. Terdapat enam kapal milik Tiongkok termasuk satu kapal perang dan beberapa kapal milik Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi ketakutan tersendiri kepada para pemancing yang merasa berada di tengah peperangan dan mengganggu aktivitas memancing mereka. Mereka takut bila suatu saat nanti Laut Natuna Utara akan dipenuhi oleh kapal perang baik dari negara China maupun pihak Aliansi AUKUS yang berpotensi mengundang terjadinya *arms race*.

Meskipun ragam respon telah diutarakan oleh beberapa negara ASEAN, namun ASEAN tidak dapat dan tidak diperbolehkan ikut campur terkait Aliansi AUKUS. Hal ini didasari oleh prinsip yang dianut negara-negara ASEAN untuk tidak mencampuri urusan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara yang tertuang dalam Kebijakan Non- Interferensi

ASEAN. Contoh lain dari penerapan kebijakan ini ketika terjadinya sebuah kudeta oleh militer di Myanmar yang menggulingkan Win Myint beserta pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Walaupun berada dalam satu kawasan regional, tetapi tidak ada negara-negara ASEAN lainnya yang berani mengambil sikap dan ikut campur dalam penanganan masalah tersebut.

Kemunculan China sebagai Negara Adidaya Baru di Kawasan Asia-Pasifik

Sebagaimana kita ketahui banyak kepentingan negara-negara sekitar bahkan negara-negara adidaya terhadap kawasan Asia-Pasifik. Baru-baru ini negara-negara maju dan adidaya secara terang-terangan politik mereka ditujukan kepada kawasan Asia-Pasifik. Sebagaimana yang kita ketahui Amerika Serikat dengan China di Asia Pasifik menjadi salah satu pemicu kehadiran AUKUS. Tulisan ini berupaya menggali makna isu rivalitas keamanan yang saat ini berlangsung antara negara adidaya Amerika Serikat dengan Cina di kawasan Asia Pasifik. Dengan kebangkitan Cina, hubungan Sino-AS telah menjadi semakin penting bagi stabilitas keamanan Asia Pasifik. Rivalitas keamanan yang terjadi antara kedua negara tersebut semacam ‘ritual lama’ yang kini diulang oleh ‘jamaah baru’.

Kontestasi politik dan keamanan yang sudah usai dengan berakhirnya Perang Dingin, secara langsung belum mampu menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal dan secara sepihak mampu terus menerus melakukan kontrol dinamika politik dunia. Hadirnya Cina memberikan alternatif dalam interaksi keamanan regional Asia Pasifik. Inisiasi strategi Cina dan respon aktif Amerika Serikat akan menentukan lanskap keamanan Asia Pasifik dalam beberapa dekade mendatang. Didorong oleh kebangkitan Cina tersebut, identitas Cina kini telah bergeser menjadi kekuatan besar yang intimidatif. Di satu sisi ia menjadi ancaman bagi kepentingan keamanan kawasan AS, di sisi lain Cina juga hadir sebagai kompetitor dalam kepentingan ekonomi AS.

Kekhawatiran negara-negara di kawasan Asia-Pasifik terhadap Cina, bersumber dari tindakan agresif negara tersebut di beberapa wilayah di kawasan, khususnya di perairan Laut Cina Selatan (LCS). Tercatat bahwa Cina tidak segan untuk melakukan konfrontasi langsung dengan negara lain (seperti Filipina) dan melakukan beberapa pelanggaran perbatasan di kawasan tersebut (misal pelanggaran batas di Indonesia). Hal inilah yang kemudian mendorong Australia untuk mempersiapkan kekuatan yang lebih

baik guna menghadapi agresivitas tersebut dan menjamin bahwa kedaulatan dari negara lainnya dapat dilindungi dari visi predator Cina melalui peta sembilan garis putus-putus atau *nine dash line*, yang didukung dengan kemampuan mereka menggunakan koersi ekonomi serta penggunaan militer untuk mencapai tujuan diplomatik yang dimiliki. Beberapa tindakan agresif Cina yang sebenarnya bertujuan untuk menyaingi kapasitas kekuatan global AS, dapat terlihat melalui gambar mengenai lokasi pangkalan militer Cina dan AS yang dapat dijadikan rujukan dari betapa berbahayanya upaya militerisasi yang dilakukan Cina dibawah ini:

Gambar 1.1 Lokasi dan Rantai Pangkalan Militer China dan AS di Kawasan Asia Pasifik



Sumber: Lippert & Perthes, 2020

Dengan berdasar pada penjelasan tersebut, artikel ini akan berfokus untuk mengulas dampak yang ditimbulkan oleh AUKUS dan reaksi dari negara lain serta organisasi di kawasan terhadap langkah Australia yang ditujukan untuk meredam penguatan pengaruh dan kekuatan militer Cina yang meningkat, dan sebagai balasan terhadap intimidasi agresif terhadap Australia, Jepang dan Taiwan (McGuirk, 2021). AUKUS juga dapat dianggap sebagai metode bagi AS sebagai rival Cina untuk menahan perkembangan Cina di dunia.

Pembentukan AUKUS di Kawasan Asia-Pasifik

Sebelum Melihat dari apa yang telah disampaikan oleh Wakil Presiden AS tersebut, maka AS memang menganggap Indo Pasifik merupakan kawasan yang penting bagi AS. AS yang memiliki kepentingan di wilayah kawasan tersebut tentu saja merasa terganggu

dengan mulai menguatnya kekuatan China di kawasan. Untuk mengurangi pengaruh China, AS membangun banyak aliansi di wilayah kawasan. Sebelumnya AS tergabung dalam aliansi The Quad yang digawangi 4 Negara. The Quad adalah gagasan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang ditawarkan pada 2007 dengan dukungan dari AS (Wakil Presiden Dick Cheney), Australia (Perdana Menteri John Howard) dan India (Perdana Menteri Manmohan Singh). Kesepakatan Keamanan Quadrilateral (Quadrilateral Security dialogue/QSD) diformat menjadi platform dialog strategis informal di antara negara-negara anggota. Untuk menggarisbawahi sinergi QSD, latihan angkatan laut bersama skala besar yang disebut Malabar juga diadakan.

QSD secara luas ditafsirkan sebagai konter diplomatik dan militer terhadap kekuatan ekonomi dan militer China yang sedang tumbuh. Jepang menghidupkan kembali dialog empat arah dengan India, Australia dan AS di garis samping KTT Asia Timur di Filipina yang diadakan dari 13-14 November 2017, dengan harapan bahwa Quad akan berusaha untuk melawan kekuatan angkatan laut China dan ekonomi di Asia. Tentu saja hal tersebut membuat pemerintah China bereaksi keras dengan mengajukan protes resmi terhadap semua anggota QSD.

Sikap dan kebijakan keempat negara yang secara bersama memandang China sebagai ancaman, tidak lagi hanya menjadi retorika atau hanya sekadar identifikasi terhadap China. Keempat negara, melalui The QUAD, dengan tegas menyatakan bahwa ancaman China di Asia-Pasifik adalah sesuatu yang nyata. Asia-Pasifik yang bebas dan terbuka menjadi pesan politik kepada China yang dianggap sebagai ancaman, mengingat negara tersebut, dengan tegas menekankan bahwa beberapa wilayah strategis di Asia-Pasifik sebagai kawasan kedaulatan dan kontrol China dalam mengeksploitasi sumber daya, serta menjadi arena kebijakan BRI (*Belt and Road Initiative*) negara tersebut. Arah perimbangan kekuatan aliansi The QUAD, selain menggunakan jarak atau kedekatan geografis oleh Jepang, India, dan Australia, juga menekankan pada kedekatan isu-isu yang berkembang di Asia-Pasifik, yaitu isu-isu maritim.

Gambar 1.2 Aliansi Pertahanan AUKUS



Sumber: Kumparan

Setelah sebelumnya tergabung dalam The Quad, AS membentuk juga Aliansi AUKUS. AUKUS merupakan bentuk kerja sama AS, Inggris, dan Australia yang bertujuan menjaga keamanan di wilayah Asia-Pasifik. Langkah awal aliansi ini akan memberikan Australia kekuatan kapal selam nuklir untuk menguatkan posisi Australia di wilayah kawasan.³⁷ Pembentukan AUKUS banyak menimbulkan kontroversi terutama bagi negara – negara yang terlibat dalam kawasan Indo-Pasifik. Banyak negara yang tidak menyetujui adanya aliansi pertahanan AUKUS ini selain banyak negara tertanggu, pembentukan AUKUS juga dinilai akan memancing perang di wilayah tersebut. Meskipun Pihak Inggris menyatakan bahwa Perdana Menteri Inggris, bersama dengan Presiden Biden dan Perdana Menteri Morrison mengumumkan sebuah kemitraan keamanan yang disebut AUKUS dan ditegaskan bahwa AUKUS bukanlah sebuah traktat, bukan pakta, bukan aliansi baru, melainkan kemitraan.

Meskipun telah ada penjelasan tersebut namun banyak negara tidak mempercayainya. Terutama dalam hal ini AS telah masuk dalam The Quad namun masih juga membentuk aliansi pertahanan baru yaitu AUKUS. Hal tersebut membuat banyak negara beranggapan bahwa langkah tersebut merupakan upaya AS untuk terus meluaskan eksistensinya agar tetap bisa bertahan di Indo Pasifik dan sebagai alat menghalau kekuatan China di wilayah tersebut.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada saat itu Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyoroti perkembangan geopolitik kerja sama pertahanan AUKUS yang dibentuk Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Kerja sama AUKUS ini dapat meningkatkan ketegangan dan ajang perlombaan senjata nuklir di kawasan Indo-Pasifik.

Kepentingan Aliansi Trilateral AUKUS terhadap Kawasan Asia-Pasifik

Kepentingan negara dan perkembangan teknologi merubah wilayah geografis tertentu sebagai wilayah yang mengalami peningkatan nilai strategis, seperti perairan internasional sebagai jalur transportasi perdagangan dunia. Kondisi itu membuat setiap negara di dunia bergantung pada kepentingan keamanan jalur transportasi untuk menjamin berbagai kegiatan ekonomi dan keamanan negara. Hal itu menjelaskan bahwa wilayah perairan menjadi objek kebijakan geopolitik dimana setiap negara cenderung berkompetisi dan bahkan mengarah pada tensi konflik ketika terdapat kepentingan yang saling berbenturan. Terlebih lagi, ketika wilayah perairan dapat dikontrol, maka kekuatan negara terhadap negara lain akan meningkat. Kontrol wilayah menjadi variabel yang memungkinkan negara untuk mempengaruhi negara lain dan membatasi negara lain dalam meningkatkan kekuatan atau mencapai kepentingan.

Keterlibatan banyak negara melalui kebijakan luar negeri untuk terlibat dalam berbagai isu menyangkut wilayah Asia-Pasifik menjelaskan tidak hanya perubahan nilai strategis wilayah Asia-Pasifik, namun juga menjadi wilayah kompetisi distribusi kekuatan antar negara. Dalam kasus kehadiran negaranegara besar di Asia-Pasifik, faktor pendorong kebijakan strategis seperti negara Amerika Serikat tidak terlepas dari kepentingan nasional negara tersebut dalam mempertahankan pengaruh global sekaligus menghadapi kebangkitan China dan Rusia sebagai ancaman di kawasan Asia- Pasifik. Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah berupaya untuk mencapai stabilitas melalui pengembangan kapasitas dan kerja sama regional, jika memungkinkan, dan pencegahan jika diperlukan. Tindakan peningkatan kapasitas, seperti bantuan keuangan, penyediaan aset, pelatihan dan pendidikan militer, serta skema kerja sama regional.

AUKUS merupakan langkah aliansi yang diambil oleh Australia guna membentuk keamanan kolektif. Keamanan kolektif (Collective Security) juga merujuk pada penerapan prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu. Sehingga dapat dianggap bahwa AUKUS menjalankan fungsi sebagai kesepakatan pertahanan kolektif yang melindungi anggotanya (khususnya Australia) dari ancaman keamanan langsung dari Cina, sebagai negara yang dianggap agresor. Akan tetapi AUKUS seolah melupakan bahwa keamanan kolektif yang berupaya diciptakan membutuhkan koordinasi dan kesediaan dari negara-negara lain di kawasan.

Menjadi sesuatu yang wajar ketika pengumuman kesepakatan mengenai pakta pertahanan ini justru mengundang kritik dan kekhawatiran dari negara lain yang pada dasarnya merasa minim melakukan tindakan-tindakan agresif. Negara tetangga langsung Australia, yakni Indonesia melalui Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jailani, menyatakan bahwa Indonesia merasa was-was atas terbentuknya AUKUS.

Letak geografis Australia membuat Indonesia sangat khawatir bahwa AUKUS akan menciptakan peningkatan signifikan dalam proyeksi kekuatan di Asia-Pasifik. Indonesia dengan jelas mengambil posisi untuk menekankan kewajiban semua pihak untuk menjaga perdamaian dan keamanan melalui penghormatan atas hukum internasional yang berlaku. Negara selanjutnya yang menunjukkan keberatan adalah Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah menyampaikan keberatan pembelian kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia pasca pertemuan yang dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Menlu Abdullah menyampaikan bahwa: “Kami sepakat soal isu terbaru di kawasan mengenai negara di dekat kami yang membeli kapal selam bertenaga nuklir baru. Meskipun negara itu tidak memiliki kapasitas untuk senjata nuklir, kami khawatir dan risau.”

Malaysia menyatakan bahwa mereka mengharapkan bahwa negara-negara Asia Tenggara dapat mencapai konsensus yang jelas merespons bentuk keamanan kolektif di Asia-Pasifik antara Australia, AS, dan Inggris tersebut. Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein menegaskan juga bahwa Malaysia teguh dan konsisten bahwa pembentukan AUKUS menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengancam perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Sehingga ia langsung menjadwalkan kunjungan ke Cina menangani isu ini dengan baik dan melalui tata cara diplomatik yang sesuai.

Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Keamanan Regional Asia-Pasifik

Perlombaan senjata adalah salah satu faktor yang bisa menimbulkan security dilemma. Security dilemma bukan hal baru dalam kajian keamanan, dari sini bisa terlihat juga sebuah ancaman keamanan. Tindakan ini juga bisa dikatakan sebagai tindakan ofensif yang dimana akan menimbulkan ancaman kepada negara lain. Masing-masing pemimpin negara AUKUS, Scott Morrison (Australia), Boris Johnson (United Kingdom), dan Joe Biden (United State of America) menyatakan dengan jelas bahwa AUKUS tidak

akan melanggar Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) yang turut disepakati dan ditandatangani oleh ketika negara tersebut pada tanggal 1 Juli 1968. Jika hal ini untuk defensif, tetapi tidak bisa dihilangkan akan terjadi ketegangan khususnya antara AUKUS dan Tiongkok yang bisa saja mejadi pemicu perang nuklir. Secara logis hal tersebut bukan hanya merugikan kedua belah pihak yang konflik akan tetapi berefek kepada kawasan Asia-Pasifik bahkan untuk perdamaian dunia. Perlu diketahui bahwa dalam NPT, setiap negara yang ikut serta dalam penandatanganan telah sepakat dan komitmen untuk melakukan batasan terhadap senjata nuklir.

Munculnya AUKUS tentunya menarik perhatian dari negara-negara di kawasan Asia-Pasifik khususnya Tiongkok yang menjadi oposisi dari Amerika Serikat. Khususnya di kawasan Asia-Pasifik mulai dari militer hingga ekonomi memang didominasi oleh Tiongkok dan ketika negara menentang Tiongkok dapat berpengaruh kepada ekonomi dan keamanan kawasan. Dengan begitu, perlindungan ekonomi sangat penting dalam upaya pencegahan ketidakstabilan atau bahkan kejatuhan. Dominasi kekuatan Tiongkok dalam berbagai aspek baik militer ataupun ekonomi di kawasan Asia-Pasifik inilah yang menjadikan AUKUS sebagai jalan untuk distribusi kekuatan di kawasan tersebut, bukan sekadar dominasi kekuasaan Tiongkok dalam kawasan.

Hal ini memang disoroti oleh Tiongkok bahwa perjanjian AUKUS merupakan sinyal dari Washington sebagai peringatan untuk menangkis bahkan melawan bagaimana perkembangan kekuatan militer dari Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengartikulasikan terdapat bahaya yang dihasilkan dari AUKUS termasuk lemahnya rezim yang non-proliferasi nuklir dan meningkatnya kompetisi nuklir. Pandangan dari Beijing memang sebagai lawan dari pihak AUKUS. Akan tetapi peluang dalam meningkatnya kompetisi nuklir bisa saja terjadi khususnya negara yang dominan di kawasan dan inilah yang nantinya akan menjadi ancaman dikawasan tersebut.

Kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok bukan hanya terhadap kawasan Asia-Pasifik bahkan pengaruhnya dalam kekuatan global juga meningkat. Pada dasarnya Australia sadar bahwa kekuatan Tiongkok memiliki kapasitas atau kemampuan untuk serangan jarak jauh bahkan jangkauan untuk melakukan serangan ke Australia. Dengan itu perlu adanya pembenahan oleh Australia karena ini menjadi salah satu urgensi

Australia dalam keamanan. Australia pun cukup khawatir jika tidak dapat mengantisipasi serangan militer Tiongkok, dengan ini pakta AUKUS lah memberi akses persenjataan kapal selam nuklir dan rudal jarak jauh. Perlu kita ketahui juga bahwasanya saat ini kawasan regional Asia-Pasifik menjadi tempat atau ladang dari ekonomi dan geopolitik global.

Tidak dapat dipungkiri bahwa AUKUS adalah respon dari kekuatan Tiongkok dan sebaliknya yaitu Tiongkok sebagai negara kuat di Asia-Pasifik mengecam dan menganggap ini ancaman. Serta negara lain yang menanggapi AUKUS sebagai ancaman atau tidak bergantung dari posisi negara tersebut. ASEAN sebagai entitas yang ada di Asia-Pasifik seharusnya bisa lebih terbuka dengan peluang yang memang dapat menguatkan keamanan seperti Kerjasama secara ketentuan regional ataupun dari eksternal. Pada akhirnya, Kerjasama penguatan juga dapat berefek kepada tumbuhnya kepercayaan strategis sehingga bisa mengedepankan konsep keamanan dalam kawasan dengan tujuan mengurangi hambatan hubungan antar negara.

Dampak AUKUS terhadap Dinamika dan Keamanan Regional Asia-Pasifik

Di dalam perubahan hubungan internasional pasca berakhirnya Perang Dingin mempengaruhi stabilitas strategis hubungan internasional di kawasan Asia- Pasifik. Hal itu dikarenakan secara geo-strategi, perubahan tidak hanya terjadi di tingkat global tetapi juga di tingkat kawasan, termasuk Asia-Pasifik. Perkembangan lingkungan strategis keamanan yang kompleks di Asia-Pasifik pasca berakhirnya Perang Dingin dapat dikenali dengan pergeseran kekuatan diantara negara-negara besar, kemunculan bertahap suatu lingkungan keamanan multipolar dengan suatu kekuatan Negara besar Asia yang memainkan peran lebih besar, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan cenderung tak dapat diduga yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara geoekonomi, terjadinya peningkatan yang signifikan dari industri pertahanan dan kemampuan militer lokal negara-negara di kawasan, dan kemungkinan terjadinya ketegangan etnik dan nasional, rivalitas ekonomi, aspirasi ketidakpuasan berkenaan dengan tingkat kesejahteraan, konflik keagamaan dan ras.

Dalam *Quadrilateral Security Dialogue* (QSD) di Manila beberapa tahun yang lalu digelar pertemuan sejumlah pemimpin negara yang berpengaruh terhadap kepentingan

Amerika Serikat (AS) yaitu India, Australia, dan Jepang. Forum tersebut mengangkat Asia-Pasifik sebagai istilah baru yang tidak hanya menggantikan Asia- Pasifik secara penyebutan maupun cakupan geografis, namun juga perluasan actor, power dan struktur di kawasan. Tujuan penggantian nama tersebut untuk mendorong iklim kerjasama yang lebih terbuka di kawasan, AS sebagai inisiator menekankan bahwa Asia-Pasifik merupakan tahap awal menuju transformasi geopolitik di kawasan.

Penyebutan “Asia” dirasa terlalu luas, heterogen dan berkonotasi kontinental daripada maritim, sementara sebutan “Asia Pasifik” yang menunjuk bagian Asia di Samudra Pasifik terasa tidak memadai. Sebutan “Indo-Pacific” (gabungan dari Indian Ocean dan Pacific Ocean) dirasa memadai atau mewakili kebutuhan tersebut. Penyebutan Asia-Pasifik juga tidak terlepas dari meningkatnya posisi superioritas India memasuki abad 21 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi India yang impresif pada dekade 1990-an dan pengembangan senjata nuklirnya.

Posisi Indonesia sebagai Negara di Kawasan Asia Pasifik terhadap Aliansi Amerika, Inggris dan Australia (AUKUS) dalam Perspektif Neorealisme

Berdasarkan Dyas Bintang, dkk. bahwa manuver terbaru untuk memperkuat hegemoni di Laut Tiongkok Selatan adalah disepakatinya sebuah pakta keamanan yang diusung sebagai aliansi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (AUKUS). Perjanjian keamanan trilateral tersebut diratifikasi pada tanggal 15 September 2021 oleh ketiga negara yang terlibat dengan tujuan pokok menyediakan armada kapal selam bertenaga nuklir bagi Angkatan Laut Australia selama beberapa dekade mendatang. Kesepakatan ini disampaikan oleh Presiden AS Joe Biden sebagai keharusan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Asia-Pasifik dalam jangka panjang. Dalam pakta tersebut, disajikan sebuah tujuan implisit untuk mengimbangi dominasi RRT pada konflik Laut Tiongkok Selatan meskipun tidak secara gamblang menyinggung RRT di dalamnya. Di sisi lain, perjanjian ini menyebabkan krisis diplomatic dengan Perancis akibat kehilangan kontrak akuisisi alutsista dengan Australia sejak 2016 untuk penyediaan 12 kapal selam bertenaga konvensional Laut Tiongkok Selatan menjadi sebuah persoalan panas yang telah melahirkan konflik dengan keterlibatan sejumlah negara di sekitar kawasan tersebut hingga negara di luar kawasan. Manuver terbaru untuk memperkuat hegemoni di Laut Tiongkok Selatan adalah disepakatinya sebuah pakta keamanan yang diusung sebagai

aliansi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia (AUKUS). Penelitian ini menganalisis posisi Indonesia beserta langkah kebijakan dan persiapan yang proporsional terhadap fenomena Aliansi AUKUS dalam perspektif teori neorealisme. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif secara penuh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan maupun teori neorealisme melalui jurnal nasional hingga internasional. Penelitian ini turut membahas beberapa poin strategis yang potensial untuk dimanfaatkan oleh Indonesia dalam menyikapi Aliansi AUKUS. Perspektif neorealisme menuntut Indonesia untuk berpandangan lebih holistik, bahwa kekuatan (power) suatu negara adalah akumulasi dari seluruh sumber daya untuk memaksa dan mengontrol negara lain dalam sistem internasional. Hal tersebut meliputi faktor kondisi geografis, postur militer yang dimiliki Indonesia, hingga bagaimana langkah politis yang dapat dianjurkan bagi Indonesia.

KESIMPULAN

Hampir semua negara ASEAN menyatakan prihatin dengan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia. Negara ASEAN khususnya Indonesia mengingatkan kembali komitmen Australia terhadap non-proliferasi nuklir dan juga keamanan serta stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Meski pejabat ketiga negara AUKUS berkali-kali menekankan aliansi ini tidak ditujukan kepada negara tertentu, sebagian besar analis mengatakan, China-lah yang memicu pembentukan AUKUS.

Pada akhirnya respon dari negara-negara ASEAN terhadap AUKUS sudah mulai terlihat paling tidak sampai dengan saat penelitian ini dilakukan adalah menganggap sebagai sebuah ancaman meskipun ada beberapa alasan juga bahwa itu merupakan peluang tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- AUKUS: Aliansi Keamanan Baru di Indo Pasifik, diakses dari: <https://www.medcom.id/foto/grafis/GKdJAP4b-AUKUS-aliansi-keamanan-baru-di-kawasan-Asia-Pasifik>.
- Burchill, Scott. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave. *Dinamika Hubungan Internasional dan Indonesia*, diakses dari: http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/01/dinamika_hubungan_internasional_dan_indonesia.pdf.

- Dubes Inggris: AUKUS Bukan Pakta Pertahanan, tapi Kemitraan Keamanan, diakses dari: <https://kumparan.com/kumparannews/dubes-inggris-AUKUS-bukan-pakta-pertahanan-tapi-kemitraan-keamanan-1wZzMfVdZPE/2>.
- Masa Depan AS di Indo Pasifik, diakses dari: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/ahli-masa-depan-amerika-serikat-ada-di-kawasan-indo-pacific/2346449>.
- Muhammad Naser El-Haq, "AUSTRALIA SEBAGAI KEKUATAN REGIONAL DALAM EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DI KAWASAN PASIFIK", UIN Jakarta.
- Mardalis. (1995). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nilai Strategis Asia-Pasifik dan Perimbangan Amerika Serikat melalui The QUAD terhadap China, diakses dari: <https://www.gresnews.com/berita/opini/117331-nilai-strategis-Asia-Pasifik-dan-perimbangan-amerika-serikat-melalui-the-quad-terhadap-china-/> 8889
- Nincic, Miroslav. (1999). The National Interest and Its Interpretation: The review of Politics. Pengertian Aliansi dan Contohnya, Tugas, Prinsip, dan Proses Aliansi, diakses dari: <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-alianse.html> Pertahanan, diakses dari: https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3073-2962/Pertahanan_51331_unukaltim_p2k-unkris.html.
- Pidato Wakil Presiden Kamala Harris tentang Kawasan Asia-Pasifik, diakses dari: <https://id.usembassy.gov/id/pidato-wakil-presiden-kamala-harris-tentang-kawasan-Asia-Pasifik/>.
- Soni Iriawan, "Dibalik Kemunculan Terminologi Asia-Pasifik", diakses dari: indopasifik/Dibalik%20Kemunculan%20Terminologi%20Asia-Pasifik.html.
- Sudarwan Danim. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia.